



Penentuan Prioritas Pengembangan Infrastruktur Wilayah Pesisir Kecamatan Muncar Menggunakan Metode *Importance – Performance Analysis* (IPA) ¹

Determining the Priority of Infrastructure Development for the Coastal Area of Muncar District by Using the Importance – Performance Analysis (IPA) Method

Aurelia Zara Adela^a, Akhmad Hasanuddin^b, Rindang Alfiah^a

^a Program Studi S1 Perencanaan Wilayah dan Kota, Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Jember, Jl. Kalimantan 37 Jember

^b Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Jember, Jl. Kalimantan 37 Jember

ABSTRAK

Kecamatan Muncar merupakan salah satu kecamatan yang berada di ujung timur Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur yang berbatasan langsung dengan Selat Bali. Kecamatan Muncar memiliki potensi yang beragam, berdasarkan RTRW Kabupaten Banyuwangi tahun 2012 – 2032 ditetapkan sebagai Kawasan Minapolitan dan Wilayah Pengembangan Pariwisata II dengan *image* wisata spiritual dan wisata bahari. Akan tetapi pada kondisi eksisting infrastruktur yang ada dinilai masih kurang mendukung kegiatan di Pesisir Muncar, sehingga terdapat permasalahan antara lain: pencemaran lingkungan, bau tidak sedap, banyaknya sampah di kawasan Pantai Muncar, sering terjadi abrasi pantai, serta kurangnya lampu penerangan. Selain itu, pada infrastruktur perikanan juga belum optimal, antara lain: akses menuju TPI Brak Kalimoro jalannya sempit dan belum beraspal, pengangkut ikan yang rendah, dermaga yang ada di Pelabuhan Perikanan belum berfungsi dan SPBN yang beroperasinya tidak menentu. Sehingga penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui prioritas pengembangan infrastruktur wilayah Pesisir Muncar dan memberikan arahan pengembangan infrastrukturnya. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan rasionalistik serta jenis penelitiannya adalah kuantitatif dan kualitatif. Pada penentuan prioritas pengembangan infrastruktur wilayah pesisir Kecamatan Muncar menggunakan teknik *Importance-Performance Analysis* (IPA) dan untuk menentukan arahan pengembangan infrastruktur menggunakan analisa triangulasi. Berdasar hasil penelitian, dapat diketahui prioritas infrastruktur, ialah: prioritas 1 (sistem pengelolaan limbah dan sanitasi, persampahan, drainase, dan jaringan jalan), prioritas 2 (fasilitas pendukung transportasi, *cold storage*, pabrik es, Stasiun Pengisian Bahan bakar Nelayan, dan Tempat Pelelangan Ikan), dan prioritas 3 (puskesmas, Koperasi Unit Desa, rumah makan, dan hotel atau *homestay*).

Kata kunci: Infrastruktur Wilayah Pesisir, Prioritas dan Importance-Performance Analysis (IPA)

ABSTRACT

Muncar District is a sub-districts located at the eastern end of Banyuwangi Regency, East Java Province which is directly adjacent to the Bali Strait. Muncar District has various potentials, based on the RTRW of Banyuwangi Regency in 2012 – 2032 it is designated as a Minapolitan Area and Tourism Development Area II with the image of spiritual tourism and marine tourism. However, the existing condition of the existing infrastructure is considered to be still less support of activities in the Muncar Coast, so that there are problems, including: environmental pollution, unpleasant odors, the amount of garbage in the Muncar Beach area, frequent beach abrasion, and the lack of lighting. In addition, the fishery infrastructure is also not

¹ Info Artikel: Accepted: Oktober 2022 Published : Desember 2022

² E-mail: delauriel525@gmail.com, ahmadhasanuddin11@gmail.com, rindangalfiah@unej.ac.id

optimal, including: access to TPI Brak Kalimoro is narrow and unpaved, fish carriers are low, the wharf at the Fishery Port is not functioning and the SPBN operating is uncertain. So that this research has the aim to determine the priority of infrastructure development in the Muncar Coastal area and provide direction for the development of its infrastructure. This research method uses a rationalistic approach and the types of research are quantitative and qualitative. In determining the priority of infrastructure development in the coastal area of Muncar District using the Importance-Performance Analysis (IPA) technique and to determine the direction of infrastructure development using triangulation analysis. Based on the research results, it can be seen that the infrastructure priorities are: priority 1 (garbage, waste management systems and sanitation, drainage, and health centers), priority 2 (electricity network, cold storage, gas station, fish auction, and road network), and priority 3 (village unit cooperative, restaurants and homestays).

Keywords: Coastal Area Infrastructure, Priority and Importance-Performance Analysis

PENDAHULUAN

Infrastruktur ialah hal yang tidak bias dipisahkan serta memiliki fungsi yang luas dalam pembangunan, berkaitan dengan lingkungan, social, budaya, politik, ekonomi dan lainnya. Pada masing – masing jenis infrastruktur memiliki fungsi berbeda yang disebabkan oleh beragam infrastruktur sesuai dengan konteksnya. Dalam suatu daerah infrastruktur menjadi hal yang begitu penting, dikarenakan memiliki fungsi untuk menunjang dan mengembangkan perekonomian daerah tersebut dengan berdasarkan potensi yang ada. Dampak baik lainnya ialah investasi di daerah tersebut juga akan meningkat, karena investor memilih lokasi dengan mengedepankan kualitas infrastruktur yang memadai untuk mengakselerasikan pembangunan ekonomi wilayah sehingga investasi yang dilakukan dapat menghasilkan keuntungan. Pembangunan infrastruktur tersebut diharapkan menjadi bentuk dalam investasi yang berwujud seperti jalan umum, jembatan, drainase, dan lainnya (Mankiw, 2003).

Pesisir merupakan wilayah yang memiliki banyak potensi pengembangan. Potensi wilayah pesisir dapat dimanfaatkan untuk beragam kegiatan, misalnya industri perikanan, pelabuhan, pertambakan, pariwisata, permukiman, pusat pemerintahan, dan sebagainya (Triatmodjo, 1999). Mayoritas penduduk dunia menjadikan kawasan pesisir sebagai tempat untuk tinggal dan berkegiatan. Berdasarkan Kodoatie dan Sjarief (2010), pada awal 1990-an, sekitar 50% hingga 70% populasi dunia bermukim pada wilayah pesisir dan pada 2000-an akhir, sekitar 75% populasi penduduk dunia memilih tinggal di wilayah pesisir. Dalam mengelola wilayah pesisir guna mendukung peningkatan perekonomian dapat dicapai dengan meningkatkan infrastruktur untuk memenuhi potensi pada wilayah pesisir (Sara, 2014).

Berdasarkan dokumen RTRW Kabupaten Banyuwangi, Kecamatan Muncar memiliki sistem perkotaan ialah Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yang ditetapkan sebagai Kawasan Minapolitan dan Wilayah Pengembangan Pariwisata (WPP) II. Kecamatan Muncar salah satu pusat kegiatan dan pengembangan di Kabupaten Banyuwangi yang mempunyai komoditas unggulan pada sektor perikanan, yaitu ikan tongkol dan lemuru. Selain itu, Kecamatan Muncar juga sebagai pemasok ikan tidak hanya untuk melayani se-Kabupaten Banyuwangi melainkan juga luar kabupaten hingga luar pulau. Berdasarkan data Perikanan Dalam Angka 2020 Kabupaten Banyuwangi, pada 2019 jumlah produksi perikanan tangkap di Kabupaten Banyuwangi sebesar 78.515 ton dan Muncar menjadi salah satu kecamatan yang menyumbang hasil perikanan tangkap yaitu sekitar 90% dari 11(sebelas) kecamatan lain yang memiliki PAD pada sektor perikanan. Hal tersebut dikarenakan Pelabuhan Perikanan Muncar langsung berbatasan dengan Selat Bali yang

menjadikan Muncar sebagai *fishing base*, karena Selat Bali merupakan selat yang memiliki pasokan ikan melimpah terutama ikan lemuru. Selain subsektor perikanan, subsektor yang menjanjikan lain ialah subsektor wisata bahari. Di Kecamatan Muncar terdapat beberapa objek pariwisata bahari yang ada di wilayah pesisir yaitu Pantai Muncar, Pantai Gumuk Kantong, Pantai Palu Kuning, Pantai Cemara dan Mangrove dan Taman Kili – kili. Dengan potensi kawasan Pesisir Kecamatan Muncar tersebut, perlu mengembangkan infrastruktur untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya pesisir dan memenuhi kebutuhan infrastruktur guna mendukung masyarakat berkegiatan pada wilayah pesisir Kecamatan Muncar.

Dilihat berdasarkan karakteristik kondisi eksisting infrastruktur yang ada di Kecamatan Muncar dapat dikatakan belum memadai, terdapat permasalahan antara lain pencemaran lingkungan, bau tidak sedap, banyak sampah yang masuk ke kawasan Pantai Muncar, sering terjadi abrasi, kurang optimalnya lampu penerangan, untuk infrastruktur pendukung perikanan juga belum optimal untuk digunakan masyarakat, akses menuju TPI Brak Kalimoro kurang memadai seperti jalan yang sempit dan belum beraspal, sempit karena banyak masyarakat yang berjualan ikan di pinggir jalan. Berdasarkan permasalahan tersebut, dalam menentukan prioritas pengembangan infrastruktur di wilayah pesisir Kecamatan Muncar menggunakan *Importance-Performance Analysis*(IPA) dan untuk arahan pengembangan infrastrukturnya menggunakan analisis triangulasi.

TUJUAN PENELITIAN

1. Menentukan prioritas pengembangan infrastruktur wilayah pesisir Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi
2. Memberikan rekomendasi pengembangan infrastruktur wilayah pesisir Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi

BATASAN MASALAH

Pemberian batasan masalah pada penelitian ini memiliki tujuan supaya lebih terarah dan tidak meluas, penelitian ini hanya membahas infrastruktur yang ada di darat, sebagai berikut:

1. Infrastruktur Dasar ialah jaringan jalan, jaringan listrik, telekomunikasi, air bersih, drainase, persampahan, fasilitas pendukung transportasi, sistem pengelolaan limbah dan sanitasi, dan puskesmas.
2. Infrastruktur Pendukung Perikanan ialah TPI, *cold storage*, sentra pengolahan ikan, pabrik es, SPBN, dan Koperasi Unit Desa.
3. Infrastruktur Pendukung Wisata Bahari ialah Rumah Makan atau *foodcourt* dan hotel atau *homestay*

METODE PENELITIAN

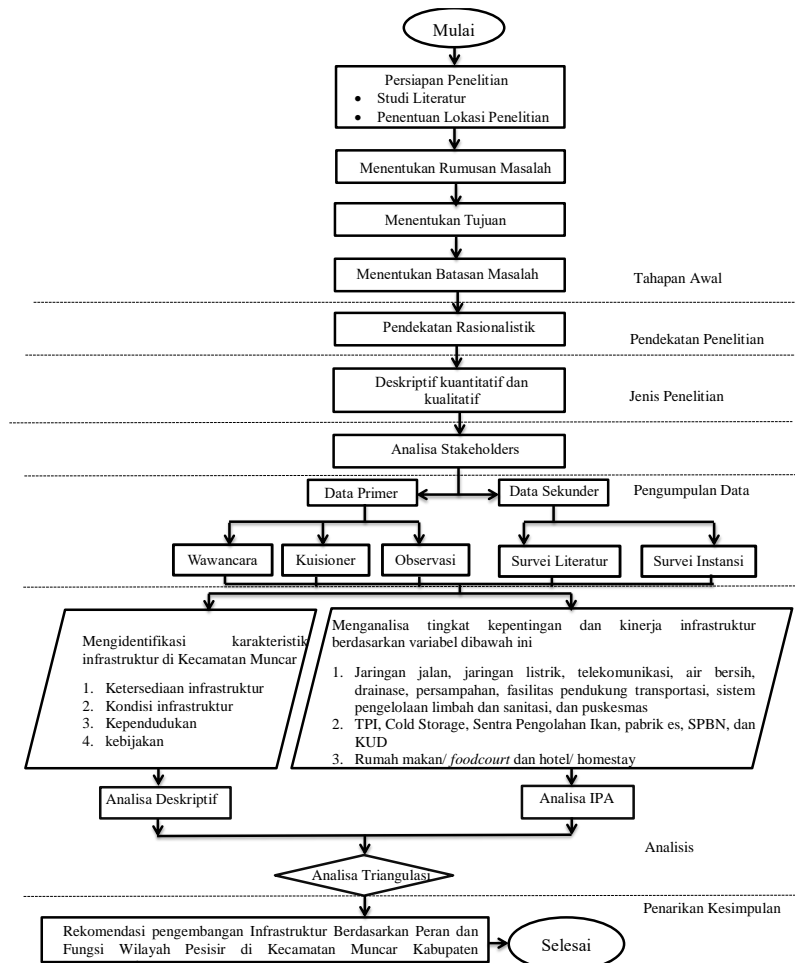
Lokasi penelitian berada di Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi yang terdiri dari 10 Desa. Pada penelitian ini, menggunakan pendekatan rasionalistik dan jenis penelitiannya adalah kuantitatif dan kualitatif. Selain itu, populasi penelitian ini ialah expert terkait bidang infrastruktur serta nelayan yang berkegiatan di Wilayah Pesisir Kecamatan Muncar. Sedangkan dalam penentuan sampelnya, teknik yang digunakan ialah *purposive sampling* yang menerapkan analisis pemetaan *stakeholder* (*Stakeholder*

Mapping). Stakeholder mapping dilakukan menyesuaikan dengan tingkat kepentingan serta pengaruh stakeholder tersebut guna mendapatkan informasi yang jelas. Berikut terdapat desain penelitian yang digunakan untuk mencapai hasil penelitian:

Tabel 1. Desain Penelitian

Tujuan	Data (Input)	Teknik Pengumpulan Data	Metode Analisis	Hasil (Output)
Menentukan prioritas pengembangan infrastruktur wilayah pesisir Kecamatan Muncar	Tingkat kinerja dan kepentingan infrastruktur	Kuesioner	Importance-Performance Analysis (IPA)	Prioritas pengembangan infrastruktur berdasar letak Kuadran di Diagram Kartesius
Memberikan rekomendasi pengembangan infrastruktur wilayah pesisir Kecamatan Muncar	<ul style="list-style-type: none"> Hasil tinjauan dan kebijakan Fakta empiri lapangan Hasil wawancara 	Survey primer, sekunder dan kuesioner	Analisis Triangulasi	Memberikan rekomendasi pengembangan infrastruktur wilayah pesisir di

Sumber: Penulis, 2021

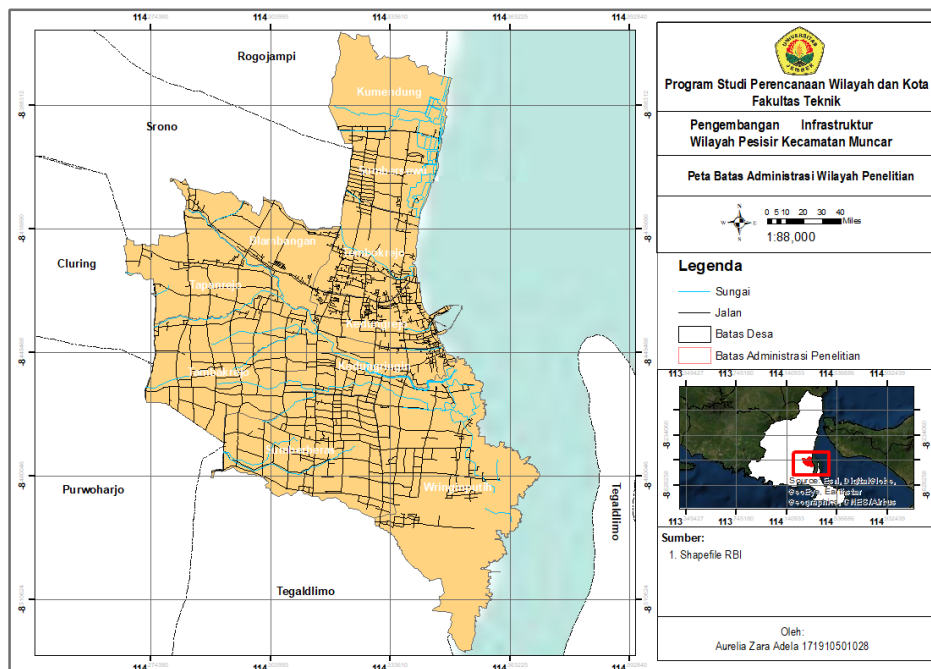


Gambar 1. Alur Pikir Penelitian

PEMBAHASAN

Gambaran umum wilayah studi

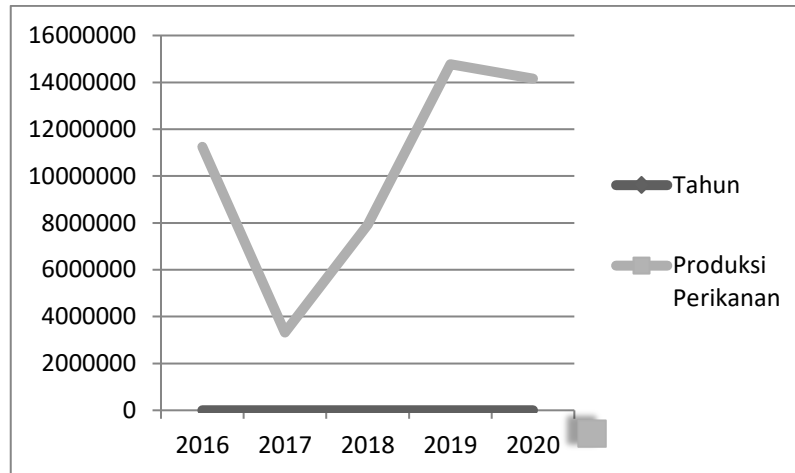
Kecamatan Muncar merupakan salah kecamatan yang berada di Kabupaten Banyuwangi. Luas wilayah Kecamatan Muncar sebesar 76,9 km² yang mana Kecamatan Muncar dilewati beberapa sungai yaitu Sungai Bomo, Sungai Binau dan Sungai Lumbun. Kecamatan Muncar terdiri dari sepuluh desa yaitu Desa Tembokrejo, Kedungrejo, Sumberberas, Wringinputih, Kedungringin, Tambakrejo, Tapanrejo, Blambangan, Sumbersewu, dan Kumendung. Akan tetapi wilayah yang berbatasan langsung dengan kawasan pesisir Muncar hanya terdiri dari 6 Desa.



Gambar 2. Lokasi Penelitian

Potensi pesisir Kecamatan Muncar

Subsektor perikanan merupakan subsector yang memiliki potensi pasar yang sangat baik, karena produksi perikanan yang dihasilkan memiliki peluang besar untuk dilakukan pengiriman ke luar, akan tetapi peluang pasar dalam negeri lebih menjanjikan. Subsector ini memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap pendapatan daerah karena telah terbukti mampu menghadapi krisis ekonomi. Berdasar Kabupaten Banyuwangi Dalam Angka Tahun 2019, nilai sektor perikanan jumlahnya meningkat dari tahun – ketahun. Nilai PDRB dari tahun 2014 – 2018 meningkat sebesar dari nilai Rp. 19.371 M – Rp. 24.350 M. selain itu, dapat dilihat pada grafik dibawah, Kecamatan Muncar memiliki tren positif karena dari tahun 2017 hingga 2019 mengalami peningkatan yang pesat dalam produksi perikanan. Dengan potensi tersebut, subsector perikanan di Kecamatan Muncar perlu dikembangkan lebih baik lagi supaya menghasilkan produksi dengan optimal.



Gambar 3. Grafik Nilai Produksi Perikanan Kecamatan Muncar (Kg)

Sumber: UPT PPP Muncar

Selain subsektor perikanan, subsektor pariwisata bahari ialah salah satu sektor yang bisa memperoleh efek pengganda (*multiplier effect*) terhadap sektor lainnya. Bersumber dari Materi Teknis RTRW Kabupaten Banyuwangi, Kecamatan Muncar masuk ke dalam WPP II yang memiliki *image* wisata bahari dan wisata spiritual. Kecamatan Muncar memiliki berbagai objek wisata. Dalam muatan RTRW Kabupaten Banyuwangi, pariwisata di Kecamatan Muncar terdapat Pantai Muncar. Selain itu, berdasarkan survey primer memiliki wisata pantai lainnya ialah Pantai Gumuk Kantong, Pantai Palukuning, dan Pantai Cemara Mangrove. Namun pada wisata pantai yang berada di Kecamatan Muncar tersebut masih terdapat permasalahan seperti akses menuju pantai jalannya tergolong rusak, kemudian kondisi pantai yang tidak terawat karena minimnya kesadaran masyarakat untuk mengelola pantai, sehingga dengan adanya pantai – pantai beserta segala kondisinya diharapkan dapat menjadikan subsector pariwisata bahari di Kecamatan Muncar berpotensi untuk dikembangkan.

Urutan prioritas infrastruktur wilayah pesisir Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi

Dalam menentukan prioritas infrastruktur apa saja yang akan dikembangkan, memerlukan analisis untuk membandingkan tingkat kinerja dan kepentingan pada masing – masing variabel yang telah disediakan. Analisis yang dapat digunakan ialah *Importance-Performance Analysis* (IPA), IPA ialah alat yang digunakan untuk menganalisis dalam menghitung perbedaan diantara tingkat kinerja dan kepentingan pada masing – masing variabel yang ditentukan dan kemudian dijawab oleh responden. Responden pada analisis ini adalah *stakeholder* yang telah ditentukan sebelumnya terdiri dari pemerintahan yang memiliki kaitan dengan infrastruktur dan beberapa tokoh nelayan sebagai pengguna infrastruktur di wilayah pesisir Kecamatan Muncar, kemudian mencari nilai akhir dan rata – rata pada masing – masing tingkat kinerja dan kepentingan yang telah diisi menggunakan penilaian skala likert. Berikut merupakan perhitungan analisis IPA:

Tabel 2. Hasil Perhitungan Analisis IPA

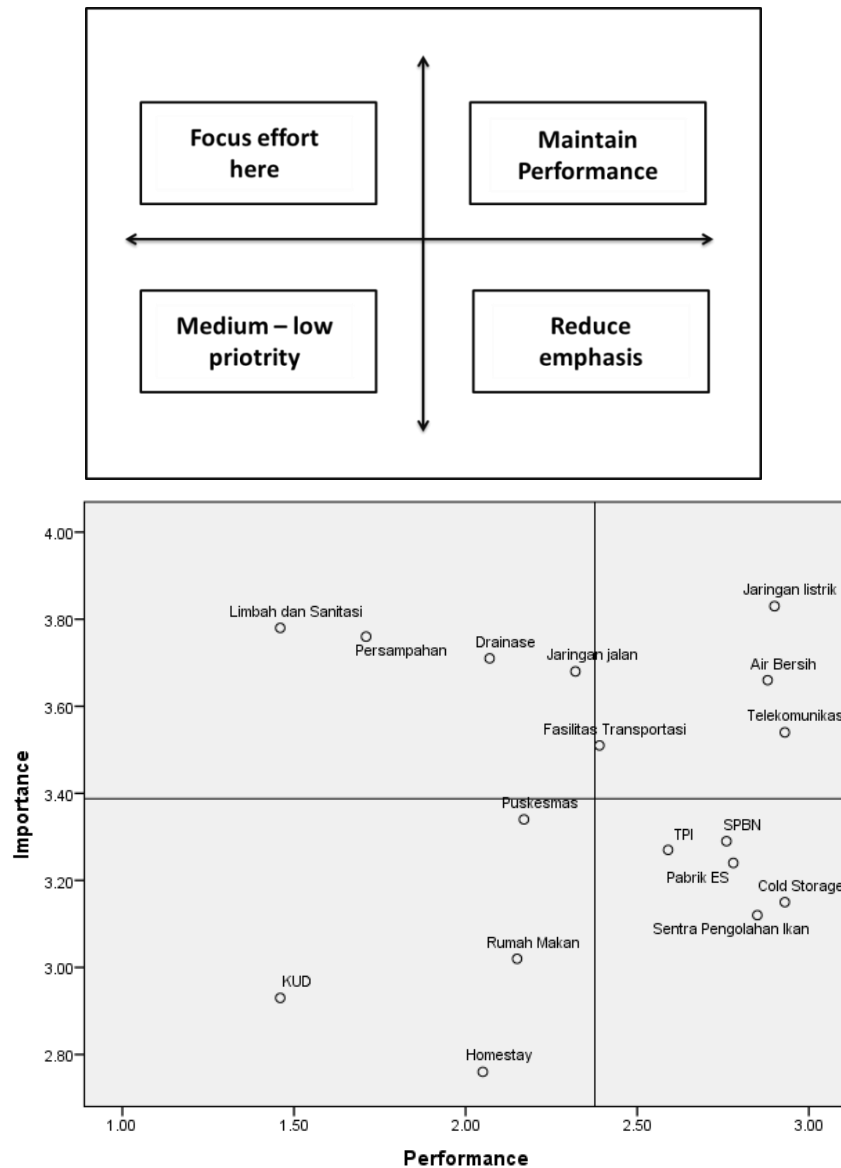
Variabel	Rata – rata Tingkat Kepentingan ($Y = \frac{\sum Y}{n}$)	Rata – rata Tingkat Kinerja ($X = \frac{\sum X}{n}$)	Tingkat Kesesuaian ($Tki = \frac{X_i}{Y_i} \times 100\%$)
Jaringan Jalan	3,68	2,32	62,91%
Jaringan Listrik	3,83	2,90	75,80%
Telekomunikasi	3,54	2,93	82,76%
Air Bersih	3,66	2,88	78,67%
Drainase	3,71	2,07	55,92%
Persampahan	3,76	1,71	45,45%
Fasilitas Pendukung Transportasi	3,51	2,39	68,06%
Sistem pengelolaan limbah dan sanitasi	3,78	1,46	38,71%
Puskesmas	3,34	2,17	64,96%
Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	3,27	2,59	79,10%
<i>Cold Storage</i>	3,15	2,93	93,02%
Sentra Pengolahan Ikan	3,12	2,85	91,41%
Pabrik ES	3,24	2,78	85,71%
SPBN	3,29	2,76	83,70%
Koperasi Unit Desa	2,93	1,46	50%
Rumah Makan	3,02	2,15	70,97%
<i>Homestay</i>	2,76	2,05	74,34%
C-Line	3,39	2,38	70,68%

Sumber: Hasil Analisis, 2021

Dapat diketahui pada **Tabel.2**, terdapat nilai rata – rata pada penilaian akhir tingkat kinerja dan tingkat kepentingan yang merupakan isi dari formulir kuesioner dari variabel infrastruktur yang penilaiannya menggunakan skala likert. Tingkat kinerja dalam penelitian ini merupakan suatu gambaran terhadap variabel yang nantinya menjadi rekomendasi pengembangan. Nilai akhir pada tingkat kinerja yang terbesar adalah jaringan telekomunikasi dan *cold storage* serta infrastruktur yang terkecil adalah Koperasi Unit Desa dan sistem pengelolaan limbah dan sanitasi. Jumlah tingkat kinerja variabel menandakan bahwa variabel dengan nilai tertinggi merupakan infrastruktur yang kerjanya sudah baik, jika semakin kecil nilai yang didapatkan maka infrastruktur tersebut kerjanya perlu diperbaiki. Selain nilai akhir tingkat kinerja, pada Tabel diatas dapat diketahui nilai akhir tingkat kepentingan, infrastruktur yang mendapatkan nilai tertinggi

yaitu persampahan dan jaringan listrik serta yang mendapatkan nilai terkecil adalah hotel atau *homestay*. Jumlah tingkat kepentingan variabel menandakan bahwa variabel dengan nilai tertinggi merupakan variabel yang penting keberadaannya untuk mendukung kegiatan di Pesisir Muncar. Nilai akhir rata – rata pada masing – masing tingkat kepentingan dan kinerja, nanti digunakan sebagai penentu titik koordinat pada matriks kartesius IPA. Nilai rata – rata X dan Y untuk mengetahui garis tengah perpotongan antar kuadran atau disebut C-Line yaitu pada sumbu X adalah 2,38 dan untuk sumbu Y ialah 3,39. Selanjutnya untuk menentukan prioritas pengembangan infrastruktur agar tercapai kepuasan yang didapatkan dari nilai prosentase tingkat kesesuaian variabel juga dapat dilihat pada tabel di atas.

Setelah mengetahui tingkat kesesuaian masing – masing infrastruktur, selanjutnya mengetahui infrastruktur apa saja yang terbagi ke dalam empat kuadran pada Diagram Kartesius. Berikut merupakan matriks Kuadran IPA:



Gambar 4. Matriks Kuadran *Importance-Performance Analysis* Pesisir Muncar
 Sumber: Hasil Analisis, 2021

Dapat diketahui dari **Gambar 4**. Diatas urutan infrastruktur berdasar letak kuadran. Kuadran I (*focus effort here*) yang berarti wilayah kuadran harus diprioritaskan karena kepentingan tinggi, infrastruktur yang berada di Kuadran I adalah persampahan, system pengelolaan limbah dan sanitasi, drainase, dan jaringan jalan. Kuadran II (*maintain performance*) yang berarti wilayah kuadran menunjukkan wilayah yang harus dipertahankan karena kepentingannya tinggi dan kinerja juga tinggi, infrastruktur yang berada di Kuadran II adalah jaringan listrik, fasilitas pendukung transportasi, air bersih, dan jaringan telekomunikasi. Kuadran III (*medium-low priority*) yang berarti wilayah kuadran tiga merupakan wilayah prioritas juga akan tetapi rendah karena kepentingannya rendah dan kepuasannya juga rendah, infrastruktur yang berada di Kuadran III adalah KUD, rumah makan, hotel atau *homestay* dan puskesmas. Dan yang terakhir Kuadran IV (*reduce emphasis*) yang berarti wilayah kuadran empat tergolong wilayah perlembahan karena ada faktor yang tidak penting tetapi memiliki kinerja yang tinggi, infrastruktur yang berada di Kuadran IV adalah TPI, SPBN, pabrik es, *cold storage*, dan sentra pengolahan ikan.

Memberi rekomendasi pengembangan infrastruktur berdasarkan tingkat prioritas penyediaan infrastruktur Wilayah Pesisir Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi

Untuk memberikan rekomendasi pada pengembangan infrastruktur di wilayah Pesisir Muncar, maka harus mengetahui tingkat prioritas penyediaannya melalui analisis sebelumnya yaitu dengan menganalisis tingkat kepentingan dan kinerja infrastruktur yang didapat pembagian kuadran. Metode yang digunakan dalam merumuskan rekomendasi pengembangan ini menggunakan analisis triangulasi, dengan membandingkan variabel infrastruktur yang didapat antara kondisi eksisting, hasil tingkat kepentingan dan kinerja, dan kebijakan / peraturan yang memiliki kaitan dengan pengembangan infrastruktur di wilayah Pesisir Kecamatan Muncar. Berikut rekomendasi pengembangan infrastruktur berdasarkan tingkat prioritas yaitu infrastruktur yang berada di Kuadran I:

Tabel 3. Rekomendasi pengembangan infrastruktur

Variabel	Fakta Empirik	Best Practice	Tinjauan Kebijakan dan Teori	Arahan
Persampahan	<ul style="list-style-type: none"> - Penumpukan sampah yang ada di pesisir Muncar didominasi oleh sampah dari permukiman, pasar dan warung – warung yang ada di pesisir TPI Brak Kalimoro maupun di Pelabuhan - Sistem pengelolaan sampah pada pesisir Muncar masih konvensional karena masih ada masyarakat yang menimbun dan 	<p>Pengembangan Infrastruktur Kampung Nelayan Di Kawasan Wisata Tapak Kota Bengkulu</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penerapan sistem daur ulang melalui sistem yang terintegrasi - Penyediaan fasilitas tong sampah, kontener gerobak dan sampah - Sosialisasi pada masyarakat untuk 	<ul style="list-style-type: none"> - Komponen infrastruktur merupakan bagian – bagian dari infrastruktur yang dianggap memiliki peran penting terhadap perekonomian dan sosial salah satunya yaitu persampahan (World Development, 1994). - Sesuai arahan RTRW Kabupaten Banyuwangi di Kecamatan Muncar dikembangkan TPA dan TPST. 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengoptimalisasian infrastruktur persampahan dengan pengadaan sistem 3R yang terintegrasi dan penyediaan fasilitas – fasilitas pendukung lainnya. - Pemeliharaan dan perawatan kualitas infrastruktur persampahan secara berkelanjutan agar infrastruktur tetap terjaga - Sosialisasi kepada masyarakat khususnya masyarakat pesisir selalu

Variabel	Fakta Empirik	Best Practice	Tinjauan Kebijakan dan Teori	Arahan
	membakar sampah.	membudayakan hidup bersih	- Memfasilitasi dan memsosialisasikan pelayanan persampahan untuk daerah – daerah terpencil terutama pedesaan dan pesisir yang didominasi oleh nelayan (RPJMD Kabupaten Banyuwangi 2016 – 2021)	membudayakan hidup bersih.
Sistem pengelolaan limbah dan sanitasi	- Belum tersedia perpipaan pengelola limbah dan sanitasi terpadu di masyarakat Pesisir Muncar - Pada kawasan industri perikanan pesisir Muncar belum terdapat pengelolaan limbah hasil perikanan (IPAL), sehingga limbah tersebut langsung terbuang di Pantai Muncar.	Pengelolaan Limbah pada Pabrik Pengolahan Ikan di PT. Kelola Mina Laut Gresik - Proses pengolahan limbah melalui IPAL yang bertujuan untuk mempercepat proses penjernihan air limbah dan mengurangi konsentrasi senyawa beracun, telah memenuhi Standar Baku Mutu Lingkungan dan jika akan dibuang ke badan air sudah aman - Penyediaan fasilitas – fasilitas pengelolaan limbah	- Bersumber dari <i>American Public Works Association</i> (Stone, 1974 dalam Yuki, 2008), infrastruktur didefinisikan sebagai fasilitas pihak ketiga yang dikembangkan atau dibutuhkan oleh lembaga publik, salah satu nya adalah pembuangan limbah untuk mempromosikan tujuan ekonomi dan sosial. - Membangun sistem perpipaan dan IPAL di kawasan industri dan pengolahan ikan di Kecamatan Muncar (RTRW Kab. Banyuwangi).	- Penyediaan fasilitas pengelolaan limbah salah satunya IPAL - Perlunya pemeriksaan dan perawatan pada IPAL secara rutin dan berkala - Membangun saluran pengelolaan limbah dan sanitasi
Drainase	Drainase di wilayah pesisir kondisinya tergolong masih kurang baik. Terutama pada kawasan industri perikanan drainasenya tersumbat oleh limbah dari pabrik dan sampah.	Kajian Kondisi Empiris Drainase Kawasan Pesisir Menuju Sanitasi Berkelanjutan - Pengendalian bentuk, tipe serta bahan pada saluran drainase sekunder - Merehabilitasi saluran drainase secara berkala agar dapat berfungsi kembali	Menurut Grigg, 1988. infrastruktur drainase dibutuhkan untuk menjadi dasar kebutuhan manusia dalam lingkup sosial dan ekonomi.	- Penyediaan infrastruktur drainase untuk mendukung kegiatan di pesisir Muncar - Dilakukannya pengendalian bentuk drainase lingkungan dengan tipe U-ditch 30/60 di pesisir Muncar - Perbaikan dan perawatan infrastruktur drainase secara berkala agar

Variabel	Fakta Empirik	Best Practice	Tinjauan Kebijakan dan Teori	Arahan
		<p>- Normalisasi drainase secara continue</p> <p>Penyediaan drainase lingkungan dengan bentuk atau ukuran U-ditch 30/60 (Review RPJIM Bidang Cipta Karya Kab. Rembang Tahun 2018 – 2022).</p>		<p>drainase tetap berfungsi secara baik.</p>
Jaringan jalan	Jaringan jalan yang beraada di wilayah studi didominasi oleh kondisi yang cukup baik. Beberapa ruas jalan yang masuk dalam kategori kurang baik yaitu jalan akses menuju TPI Brak kalimoro dan jalan menuju wisata pantai cemara dan mangrove yang berada di Desa Wringinputih.	<p>Pengembangan Infrastruktur Kampung Nelayan Malabero di Kawasan Wisata Pantai Tapak Paderi Kota Bengkulu</p> <p>- Perbaikan jalan lingkungan</p> <p>- Mengembangkan jaringan jalan pada kawasan wisata bahari yang terintegrasi dengan kawasan permukiman nelayan</p> <p>- Pembangunan fasilitas pelengkap seperti pedestrian, zebra cross dan rambu – rambu lalu lintas</p>	Jaringan jalan adalah pendukung utama untuk aktivitas masyarakat dalam sistem sosial dan ekonomi (Grigg,2000).	<p>- Perbaikan pada jalan yang rusak dan peningkatan jenis perkerasan jalan menjadi aspal pada seluruh jalan di Pesisir Muncar khususnya pada akses dari dan menuju wilayah pesisir untuk memudahkan kegiatan perikanan dan wisata bahari.</p> <p>- Pembangunan fasilitas pelengkap jalan seperti pedestrian, zebra cross dan rambu lalu lintas di seluruh jalan wilayah Pesisir Muncar.</p>

Sumber: Hasil Analisis, 2021

KESIMPULAN

- Urutan prioritas pengembangan infrastruktur wilayah pesisir Kecamatan Muncar berdasarkan kategori pada kuadran 1, 2 dan 3, ialah; (a) Kuadran I (*focus effort here*) terdiri dari persampahan, sistem pengelolaan limbah dan sanitasi, drainase, dan jaringan jalan; (b) Kuadran II (*maintain performance*) terdiri dari jaringan listrik, fasilitas pendukung transportasi, air bersih, dan jaringan telekomunikasi; dan (c)

Kuadran III (*medium-low priority*) meliputi KUD, rumah makan, hotel atau *homestay*, dan puskesmas.

2. Rekomendasi pengembangan infrastruktur sesuai dengan urutan prioritas adalah persampahan dengan rekomendasi mengoptimalkan infrastruktur (a) persampahan, dengan pengadaan sistem 3R, perawatan kualitas infrastruktur persampahan secara berkelanjutan, dan sosialisasi kepada masyarakat untuk membudayakan hidup bersih; (b) sistem pengelolaan limbah dan sanitas, penyediaan fasilitas pengelolaan limbah salah satunya IPAL, pemeriksaan dan perawatan pada IPAL secara rutin dan membangun saluran pengelolaan limbah dan sanitas, (c) drainase, dengan penyediaan infrastruktur drainase, pengendalian betuk drainase lingkungan dengan tipe U-ditch dan perbaikan serta perawatan infrastruktur drainase secara berkala; (d) jaringan jalan, dengan perbaikan pada jalan yang rusak dan peningkatan jenis perkerasan jalan menjadi aspal pada seluruh jalan di Pesisir Muncar dan pembangunan fasilitas pelengkap jalan seperti zebra cross, rambu – rambu lalu lintas dan lain sebagainya.

DAFTAR PUSTAKA

- Grigg, Neil. 1988. *Infrastructure Engineering and Management*. John Wiley and Sons
- Mankiw, N, G. 2003. *Teori Makroekonomi Edisi Kelima, Terjemahan*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Putra, K, E. 2016. Perencanaan Kawasan Pesisir Sebagai Kawasan Cepat Tumbuh di Kota Medan. *Jurnal ArchiGreen*. 3(5): 54 60.
- Sara, La. 2014. *Pengelolaan Wilayah Pesisir*. Bandung: Alfabeta
- Thaher, M, S. 2010. *Pengembangan Infrastruktur Kampung Nelayan Malabero Di Kawasan Wisata Pantai Tapak Paderi Kota Bengkulu*. Semarang: Universitas Diponegoro
- Triatmodjo, Bambang. 1999. *Teknik Pantai*. Yogyakarta: Beta Offset
- Wulansarai, P, D. 2011. Pengelolaan Limbah pada Pabrik Pengolahan Ikan di PT. Kelola Mina Laut Gresik. *Jurnal Ilmiah Perikanan dan Kelautan*. 3(1): 125. 2(1): 61 – 68.